

# Pelayanan Pendidikan Masih Timpang

**BANDUNG** – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wahyudin Zarkasyi mengakui adanya ketimpangan antara standar pelayanan pendidikan di kota dan di desa.

Untuk memberikan kesempatan pendidikan di perguruan tinggi, *affirmative action* bagi siswa Jabar yang ada di pelosok daerah tidak bisa ditawarkan lagi.

“Kalau anak desa dan kota bersaing, ya jelas anak desa kalah, standar pelayanannya saja berbeda. Mulai dari fasilitas hingga gurunya. Untuk itu, afirmasi wajib dilakukan,” katanya saat ditemui sesuai menghadiri acara Penyaluran Dana Bina Lingkungan Mandi-

ri di Gedung Mandiri, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, kemarin.

Menurut dia, *affirmative action* tidaklah membuat siswa manja, meski diakui sebagai tindakan diskriminasi. Namun, hal tersebut dilakukan untuk keadilan, sehingga menjadi salah satu solusi pemerataan pendidikan tinggi bagi siswa daerah.

“Coba lihat bagaimana siswa di Cidaun. Kalau mereka tidak diafirmasi akan tetap saja seperti itu, tidak bisa meng-

ubah keadaan, orang miskin bakal miskin terus *dong*,” ujarnya.

Wahyudin menjelaskan, model afirmasinya diselenggarakan oleh pusat seperti yang dilakukan pada siswa asal Papua. Melalui *affirmative action*, siswa-siswa miskin yang berasal dari daerah diseleksi sesuai dengan kuota yang ditetapkan pemerintah, begitu juga dengan penempatannya.

Berdasarkan data Unpad, terjadi penurunan jumlah mahasiswa asal Jabar di Unpad. Pada 2011, mahasiswa Jabar di Unpad sebanyak 52% dan dari jumlah tersebut sebanyak 51%-nya berasal dari SMA di Kota Bandung. Sementara pada 2012, jumlahnya menurun menjadi 49,7%.

Rektor Unpad Ganjar Kurnia mengatakan, siswa asal Ja-

bar kalah bersaing dengan siswa dari provinsi lain dalam seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN).

“Model seleksi masuk perguruan tinggi juga harus diubah. Saat ini masih mengandalkan kemampuan kognitif sehingga siswa daerah kalah bersaing.

Wakil Ketua IKA Unpad Sali Iskandar mengatakan, diperlukan upaya untuk bisa memberikan kesempatan pada siswa Jabar salah satunya melalui seleksi mandiri Unpad (SMUP). Sali yang juga merupakan Ketua Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPTSI) mengatakan, selain melalui SMUP, solusi lain adalah memperbaiki standar pelayanan maksimal SMA di Jabar.

● masita ulfah